

HSA/ARL
3.1.4 (d)

KIPRAH

HUNIAN, INFRASTRUKTUR, KOTA DAN LINGKUNGAN

Asa Wujudkan Kota Hijau Berkelanjutan

Imam S. Ernawi:
Kota Selain Direncanakan,
Harus Pula Dirancang

Hadi Susilo Arifin:
Kota Hijau Bukan Hanya RTH

Olga Lidya:
Dukung Program Green City

Dewan Redaksi:

Setia Budhy Algamar

• Ruchyat Deni Jakapermana

• Danis H Sumadilaga • Pardino • Sugiyanto • Taufik Widjoyono • Susmono

• Rani Woro Wirasmi • Tri Djoko Waluyo

Pemimpin Umum:

Waskito Pandu

Pemimpin Redaksi:

Dedy Permadi

Wakil Pemimpin Redaksi:

Ety Winarni

Redaktur Pelaksana:

Yunaldi • Djuwanto

Redaksi:

Lisniari Munthe • Warjono • Srijanto

• Ade Syaiful • Krisno Yuwono • Wayan Yoke

Editor:

Endah Prihatiningtyas

Desain/Artistik:

Agus Iwan Setiawan • Dian Irawati

Fotografer:

Tim Dok. Puskom

Sekretaris:

Widowati • Litha

Kontributor:

Taufan Madiasworo • Wijaya

• Putut Marhayudi

Sirkulasi/Distribusi:

Anas S • Yusron • Nadi Tarmadi

• Sutikno • Budi

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum

Alamat:

Puskom PU, Gedung Bina Marga Lt.1

Jl Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Telp./Fax: 021-725 1538, 021-722 1679

e-mail:kiprah@pu.go.id

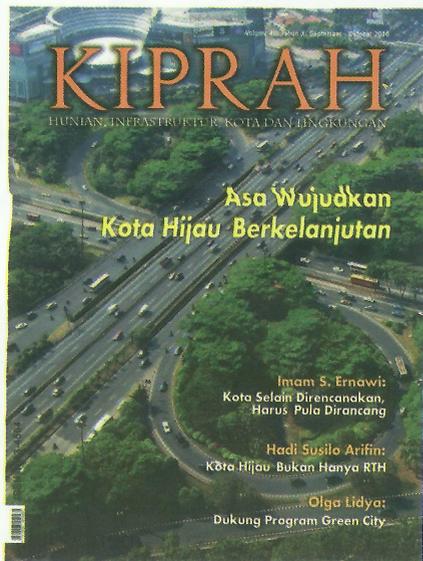
Mewujudkan Kota Hijau, Butuh Langkah Nyata, Bukan Sekedar wacana

Kota hijau, atau sering disebut *Green City*, dewasa ini banyak sekali dibicarakan, tak terkecuali di Indonesia. Sejak tahun 2005, pemerintah kota di berbagai negara terus berupaya mewujudkan kota hijau, yang di beberapa kalangan mungkin saja masih merupakan istilah yang asing.

Dewasa ini kota telah ditinggali oleh tak kurang dari 50% penduduk. Masyarakat dengan demikian lebih banyak bermukim dan beraktivitas di kota. Kepadatan dan keruwetan akibat mobilitas penduduk di dalam kota juga menjadi semakin tinggi, dan apabila pembangunan kota tidak direncanakan dan dikendalikan dengan baik, bisa jadi tingkat kenyamanan tinggal di dalamnya akan menurun. Kota hijau boleh jadi merupakan jawabannya. Untuk mewujudkannya, beberapa pengamat menggarisbawahi pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca, menurunkan penggunaan sumber yang tak terbarukan, mengembangkan penggunaan energi dan sistem transportasi ramah lingkungan, mempertahankan, mengembalikan dan bahkan memperluas keberadaan ruang terbuka hijau, serta mengurangi timbulan sampah antara lain melalui program daur ulang. Prasyarat tersebut tentu saja akan membawa dampak terhadap pentingnya reorientasi kita dalam membangun kota. Efisiensi penggunaan energi (terutama listrik) dan pendingin udara, serta pengelolaan limbah dan sampah ramah lingkungan pada bangunan gedung, tentu saja memerlukan perubahan paradigma dalam desain bangunan dan tapaknya. Prasyarat sebuah kota hijau juga menuntut perubahan sistem transportasi kota yang lebih mengutamakan transportasi massal dengan bahan bakar ramah lingkungan dan fasilitas bagi pejalan kaki dan sepeda, ruang terbuka hijau dalam luasan dan kualitas yang memadai, serta dapat dikendalikannya kualitas sumber-sumber air terhadap pencemaran.

Para pakar dan pengelola kota tentu saja tak asing dengan berbagai langkah tersebut. Sudah sedemikian banyak seminar dan diskusi mewacanakan hal tersebut. Namun, cukup kuatkah komitmen para pengelola kota dalam mengimplementasikannya? Apakah rencana tata ruang dan rencana rincinya telah mengakomodasi sistem transportasi publik (kereta api, bus), *pedestrian* dan jalur sepeda, maupun taman kota? Apakah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi para pemilik gedung baru dapat diterbitkan setelah para arsitek dan perancangannya mendesain gedung dengan kaidah 'hijau'? Apakah program daur ulang sampah merupakan prioritas utama sebuah kota? Sedemikian banyak langkah-langkah implementatif yang semestinya dilakukan oleh para pengelola kota, apabila kotanya ingin di 'cap' sebagai kota hijau. **(Redaksi)**

Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke kiprah@pu.go.id, disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.



NUANSA

Mewujudkan Kota Hijau Butuh Langkah Nyata Bukan Sekedar Wacana..... 3

LINTAS INFO

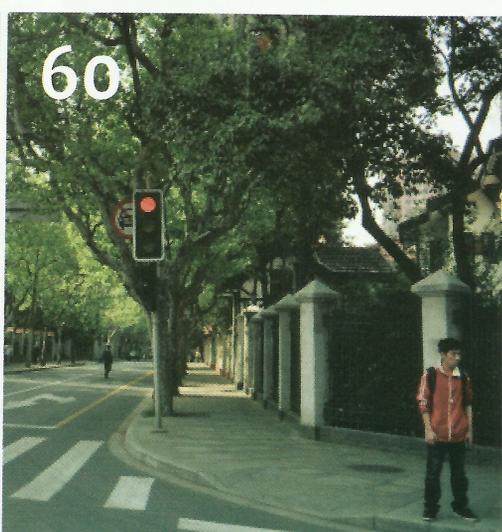
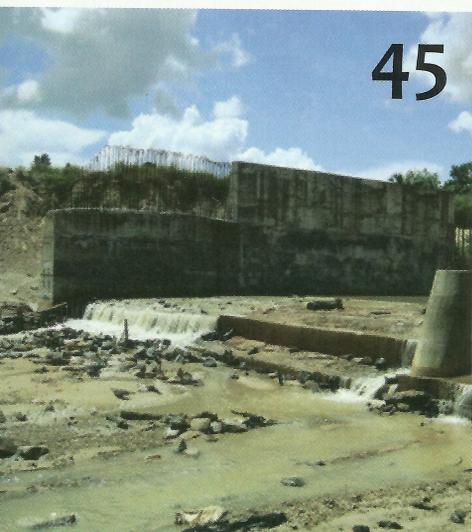
Kementerian PU Kirimkan Alat-alat Berat Ke Wasior, Papua Barat..... 6
 Menteri PU Buka Forum Bisnis Promosi Investasi Infrastruktur di Shanghai..... 7

LAPORAN UTAMA

Mewujudkan Kota Hijau Berkelanjutan..... 8
 Imam S. Ernawi: Kota Selain Direncanakan, Harus Pula Dirancang..... 12
 Hadi Susilo Arifin: Kota Hijau Bukan Hanya RTH..... 14
 HBKB, Langkah Awal Menuju Kota Hijau..... 16
 Jalur Pejalan Kaki dan Pengendara Sepeda Terabaikan?..... 17
 Menuju Kota Sehat dan Selaras dengan Alam..... 19
 Wujudkan Kota Satelit Hijau..... 20
 CSR Lingkungan: Kontribusi Swasta Menghijaukan Kota..... 22
 Memetakan "Hijau" Kota..... 24



Sekolah Hijau, Pembelajaran Sanitasi di Lingkungan Sekolah.....	26	Lintas Selatan Kalteng Terus Dikebut.....	57
Pengelolaan TPA yang Ramah Lingkungan.....	29	Belajar Menjadi Kota Manusiawi Ala Shanghai.....	60
AKTUALITA		LAPORAN KHUSUS	
Amblesnya Jl. R.E. Martadinata	32	Perbatasan: Menjaga Tapal Batas dengan Kemampuan Terbatas.....	62
Capaian Kinerja Kementerian PU Per 11 Oktober 2010.....	36	Mempererat Rasa Persaudaraan.....	65
Menteri Pu Ajak Masyarakat Peduli Sanitasi.....	37	Tidak Ingin Terkucil.....	67
SELINGAN		Abrasi Kian Dahsyat Menggerus Pulau-pulau di NTT.....	69
Di Desa Suara Lesung Kian Tak Terdengar.....	38	Rusak dan Hilangnya Halaman Rumah Kami.....	72
Sansevieria, Tanaman Cantik Berkhasiat Unik.....	40	WACANA	
INFO BUKU		Trotoar, Antara Ada dan Tiada.....	74
Memaknai Ruang Terbuka Hijau.....	41	JENDELA	
GALERI		Olga Lidya: Dukung Program Green City.....	77
Better City, Better Life.....	42	INFO TEKNOLOGI	
GLOSSARY	44	Clean Construction, Metode Konstruksi yang Ramah Lingkungan.....	78
JELAJAH		HUMANIKA	
Empat Embung Dibangun di Daerah Perbatasan.....	45	Iman Soedradjat: Kaligrafi yang Divisualkan.....	80
Trans Kalimantan: Jalan Penuh Perjuangan.....	47	KARIKATUR	
Kalimantan: Daerah Kaya, Infrastruktur Merana.....	50	Kota Hijau.....	82
Lelah Arungi Jalan di Kalteng.....	53		



Ralat:

Redaksi meminta maaf atas kesalahan penulisan pada artikel "Preservasi dan Pembangunan Jalan Fokus Utama Sulawesi" dalam majalah KIPRAH Volume 38/Tahun X/ Juli-Agustus 2010. Pada pembukaan, kalimat kedua, tercantum "...dengan total panjang jalan nasional 7,1 km yang mencakup...", seharusnya tertulis "...dengan total panjang jalan nasional 7.100 km yang mencakup...". (Redaksi)

Hadi Susilo Arifin: Kota Hijau Bukan Hanya RTH

Penghijauan di gedung perkantoran sebagai salah satu perwujudan kota hijau. (Foto: Endah)

Green city, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kota hijau, memiliki banyak padanan kata yang lain, misalnya *ecological city* (kota yang berwawasan lingkungan), serta *sustainable city* (kota yang berkelanjutan). Demikian menurut pendapat Hadi Susilo Arifin, Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Menurut Hadi, selama ini masyarakat menganggap bahwa kota hijau identik dengan ruang terbuka hijau (RTH). Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun, yang harus dipahami adalah RTH hanya salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan kota hijau.

Konsep utama dari kota hijau adalah

3 penghematan, yakni hemat energi, hemat lahan, dan hemat bahan/material. Menurut *International Environmental Technology Center*, ada 18 indikator yang terbagi ke dalam 3 tahap untuk mewujudkan kota hijau.

Tahap pertama adalah *promotion of eco office* yang memiliki 7 indikator, yaitu penghematan energi, penghematan air, pengurangan sampah padat, pengembangan daur ulang, konsep hijau yang aman, konservasi air dan udara yang bersih, serta pengendalian bahan kimia.

Tahap yang kedua, yaitu *promotion of eco project*. Tahap ini terdiri atas 6 indikator, yakni penggunaan material ramah lingkungan, penggunaan alat yang ramah lingkungan, penggunaan barang

daur ulang, pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan teknologi hijau/berwawasan lingkungan, serta mempromosikan penghijauan.

Tahap ketiga adalah *green city planning* (perencanaan kota hijau), terdiri atas 5 indikator, yaitu adanya panduan tentang infrastruktur ke-PU-an yang bersifat hijau, panduan untuk perumahan hijau, meningkatkan transportasi publik, terutama pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT), peningkatan *capacity building* (kemampuan dan kesadaran masyarakat), serta sistem manajemen lingkungan (*Environmental Management System/EMS*) yang terintegrasi.

Perencanaan dan pengelolaan tata ruang kota-kota di Indonesia seharusnya bersifat terintegrasi. Pun, jika berbicara

tentang kota hijau, kita tidak hanya memikirkan kota saja (*eco city*), tetapi juga memikirkan desa (*eco village*). Jangan sekali-kali perencanaan itu bersifat terpisah. Tidak mungkin kita membangun kota hijau jika hanya mengutak-atik satu kawasan saja. Kita memerlukan sesuatu yang komprehensif. Misalnya, kita tidak akan bisa membangun Jakarta sebagai kota hijau jika tidak didukung daerah-daerah di sekitarnya, baik Tangerang, Bogor, Depok, maupun Bekasi.

Sejauh ini, kebijakan dan perencanaan tata ruang kota-kota di Indonesia secara praktis memang belum mengarah ke kota hijau. Jikapun ada, maka kebijakan tersebut hanya terbatas pada sektor tertentu saja. Misalnya, penyediaan RTH sesuai amanat UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Konsep kota hijau juga dicoba diterapkan dalam pembangunan beberapa kota baru/kota satelit, tetapi itu pun hanya sebatas slogan dan penyediaan RTH saja. Pada skala kota, memang sudah ada kampanye *car free day* maupun kampanye *bike to work*. Tetapi, kampanye tersebut kurang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya pembangunan jalur sepeda, MRT, dan sebagainya.

Di kota-kota besar yang sudah mapan, upaya untuk mewujudkan kota hijau memang akan menghadapi banyak kendala, baik kendala secara bio-fisik, sosial, maupun ekonomi, dan terutama budaya masyarakat. Di tengah masyarakat kita masih berkembang budaya egoisme, istilahnya “asal tidak di halaman rumah saya” (*Not In My Back Yard/NIMBY*). Mereka kurang peduli dengan kondisi lingkungan sekitar, pokoknya yang penting rumah mereka sendiri bersih. Seharusnya masyarakat tidak bersikap menutup mata seperti itu, sebab pembangunan kota hijau adalah menyangkut masalah budaya dan perilaku masyarakatnya.

Untuk kota-kota yang relatif kecil/baru, seharusnya pembangunannya bisa di-

rencanakan dan dikelola dengan baik, selama ada komitmen yang terintegrasi dari pemerintah, pihak swasta, serta penduduk kota. Di daerah-daerah, masyarakat cenderung lebih peduli kepada lingkungan karena mereka memiliki kearifan lokal yang berhubungan dengan adat istiadat atau kepercayaan setempat. Dengan adanya kearifan lokal tersebut, mereka punya zonasi pemanfaatan lingkungan, terutama hutan.

Upaya untuk mewujudkan kota hijau harus didukung penuh oleh komitmen tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus memiliki *good will* untuk menjalankan apa yang disebut dengan *eco politic*. Yaitu, politik-politik yang mengarah ke pelestarian lingkungan, misalnya melalui UU yang pro terhadap ramah lingkungan. Saat ini, kebijakan yang mengarah ke tujuan tersebut sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi jumlah dan implementasinya. Pemerintah juga mesti segera mengevaluasi tata ruang kota dengan benar dan akurat sesuai dengan standar dan peraturan yang ada. Selain itu, perlu adanya komitmen tinggi dalam penyusunan rencana penataan dan pengelolaan kota yang ramah lingkungan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Selanjutnya, pemerintah harus melaksanakan penegakan hukum. Konkretnya, memberi sanksi bagi setiap pelanggaran dan sebaliknya, memberikan *reward* bagi masyarakat yang patuh. Dari sisi teknis, pemerintah bisa mengurangi laju perubahan tata guna lahan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan melakukan konsolidasi lahan bagi ruang-ruang kota yang kurang teratur, serta mendesain *green network* dengan koridor hijau maupun koridor biru. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menerapkan manajemen limbah secara terintegrasi dan mengimplementasikan konsep *green infrastructure*, *green building*, serta *green industry*.



Hadi Susilo Arifin, Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor. (Foto: Wy)

Perusahaan swasta juga perlu mengambil peran. Salah satunya adalah dengan menjalankan kegiatannya secara pro hijau. Mereka juga harus mematuhi peraturan yang ada dengan disiplin tinggi serta berkontribusi dalam menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Pemerintah memang yang membuat peraturan, tetapi perusahaan merupakan salah satu pihak yang menjalankannya, apakah itu dengan *corporate social responsibility* (CSR), penyediaan taman dan RTH, serta penggunaan bahan bangunan dan material yang ramah lingkungan.

Last but not least, masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan kota hijau. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Sebab, pada dasarnya masyarakat sebenarnya punya kekuatan jika mereka mau. Jangan bersikap acuh tak acuh jika pemerintah memberikan bimbingan ataupun bantuan.

Masyarakat perlu berpikir global, tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri saja (budaya NIMBY). Konsep pro hijau harus dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hemat energi, hemat lahan, dan hemat bahan. Selain itu, adalah penting untuk selalu mematuhi peraturan yang ada serta penerapan semboyan hidup sehat. (Ifn)

PKPD-PU

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
Bidang Pekerjaan Umum



2010

Merupakan Ajang Apresiasi kepada daerah yang menunjukkan tingginya komitmen untuk menyediakan infrastruktur Pekerjaan Umum di daerahnya.

AGENDA

29 Oktober 2010

Penilaian Nominasi oleh Tim Juri

15 November 2010

Penetapan Penerima Penghargaan oleh Menteri PU

26 November 2010

Penganugerahan Penghargaan

(Tempat Balai Kartini, Jam 19.00 WIB)

3 Desember 2010

Penayangan Acara Penghargaan di Metro TV



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

